

Kontroversi Temuan Fitra

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menempatkan Provinsi Kalbar pada ranking ke-5 terkorup dari 33 provinsi se-Indonesia.

Fitra membuat ranking provinsi berpotensi terkorupsi yang didasarkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2011.

Dalam IHP itu, tercatat untuk 33 provinsi, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun (Rp 4.174.640.290.000). Dengan sebanyak 9.703 kasus. Kerugian ini terjadi dari tahun anggaran 2005-2011.

Berikut 5 besar urutan provinsi yang paling berpotensi korupsi. Yakni, 1. Provinsi DKI Jakarta, dengan kerugian negara sebesar Rp 721.519.140.000 (715 kasus). 2. Provinsi Aceh Rp 669.849.650.000 (629 kasus). 3. Provinsi Sumatera Utara Rp 515.569.770.000 (334 kasus). 4. Provinsi Papua Rp 476.986.970.000 (281 kasus). Dan ke-5 Provinsi Kalbar, Rp 289.858.520.000 (334 kasus).

Ironisnya, BPK RI Perwakilan Kalbar malah meragukan data seperti yang dilansir Fitra terkait kerugian daerah Kalbar. Yang disebut-sebut mencapai Rp 289,8 miliar (2005-2008).

BPK menduga angka tersebut termasuk kategori kerugian daerah yang masih berupa informasi. Pertama, yang menjadi tanda tanya apakah data itu khusus Pemprov Kalbar atau secara keseluruhan hingga kabupaten/kota se-Kalbar. Kemudian, kerugian daerah versi data Fitra itu seperti apa?

Berdasarkan data yang dibebankan BPK bahwa kerugian daerah Pemprov Kalbar yang ditambah dengan kabupaten/kota se-Kalbar tidak mencapai angka seperti yang dilansir oleh Fitra.

Sementara itu, terkait kerugian daerah, BPK juga membaginya dalam tiga kategori. Yakni kerugian daerah dalam proses penetapan, sudah penetapan, dan masih berupa informasi.

Bahkan tak hanya BPK saja yang membantah tuduhan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar juga terkesan berang terkait data yang dibebankan oleh Fitra tersebut. Bahkan Pemprov juga mengklaim bahwa Pemerintah telah mencermati apa yang dijelaskan oleh BPK Perwakilan Kalbar terkait sumber data yang dipakai Fitra.

Sementara itu, data terbaru Pemerintah Provinsi Kalbar menyebutkan bahwa tinggal 1 rekomendasi yang belum selesai.

Yang jelas, publik berharap semua pemangku kebijakan bisa bersikap adil dan transparan serta tunduk dan patuh dengan segala ketentuan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku di republik ini.

Dan apabila perlu dan memungkinkan, publik sangat mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memberikan atensi terkait temuan data-data tersebut. Sehingga beragam tuduhan serta dugaan-dugaan yang menyeruak ke permukaan bisa segera dituntaskan.